## PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENDIDIKAN BELA NEGARA (PBN) YANG TEPAT UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

#### Yunita

IAIN Syekh Nurjati Cirebon yunitayunita2@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiwa tentang Pendidikan Bela Negara (PBN) yang tepat sesuai dengan perkembangan kebutuhan mahasiswa di Universitas Siliwangi (UNSIL). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif dengan pola "the dominant-less dominat design". Bagian pertama menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni melalui metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa peserta kegiatan Pendidikan Bela Negara UNSIL Tahun 2020 yaitu 2846 mahasiswa dan survey dilakukan kepada sampel yaitu 200 mahasiswa dari berbagai jurusan. Sementara, untuk pendekatan kualitatif, dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 15 mahasiswa peserta PBN dari berbagai jurusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi tentang desain bela negara yang dibutuhkan, sebagian besar mahasiswa (38%) memilih Super Camp sebagai bentuk kegiatan yang di butuhkan, dengan alasan lebih menyenangkan, lebih dekat dengan alam, terkesan serius tapi santai. Sebagian besar lainnya (36%) memilih model Wajib Militer sebagai bentuk pendidikan bela negara yang dibutuhkan. Sebagian mahasiswa (20%) memilih berbentuk penyampaian materi, yang menarik. Mahasiswa lainnya (6%) memeberikan option (d) yaitu lainnya, dengan mencantumkan: 1) pengenalan wilayah Indonesia, batas negara, bentuk ancaman yang harus ditaklukan, dll. 2) Camping & Survival, 3) pendidikan karakter, 4) materi & prakteknya, 5) kegiatan yang membentuk mental.

Kata kunci: pendidikan bela negara, pendidikan tinggi, persepsi mahasiswa,

#### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine student perceptions of State Defense Education (PBN) that were appropriate to the times and needs of students at Siliwangi University (UNSIL). This study uses two approaches, quantitative and qualitative with the pattern of "the dominant-less dominat design". The first part of this research uses a quantitative approach, namely through the survey method. The population in this study

were all students participating in the 2020 UNSIL State Defense Education activity, namely 2846 students and the survey was conducted on a sample of 200 students from various majors. Meanwhile, for the qualitative approach, it was conducted by conducting interviews with 15 PBN participants from various majors. The results of this study indicate that the perception of the required state defense design, most students (38%) choose Super Camp as a form of activity that is needed, on the grounds that it is more fun, closer to nature, seems serious but relaxed. Most of the others (36%) chose the military service model as the required form of state defense education. Some students (20%) chose the form of material delivery. Other students (6%) gave option (d), namely others, by including: 1) introduction to Indonesian territory, national borders, forms of threats that must be conquered, etc. 2) Camping & Survival, 3) character education, 4) material & practice, 5) mental building activities.

**Keywords**: state defense education, higher education, student perception,

#### **PENDAHULUAN**

Globalisasi memberi pengaruh positif dan negaratif. Dampak negatif dari globalisasi dapat ditunjukkan dengan semakin mengikisnya jati diri bangsa. Lebih lanjut Budimansyah (2010) menjelaskan bahwa globalisasi menjadikan kalangan muda bangsa Indonesia lebih tertarik pada budaya baru yang ditawarkan oleh agen budaya luar sekolah dibandingkan dengan budaya Indonesia yang ditanamkan di sekolah. Hal itu akan mengakibatkan konflik nilai pada diri kalangan muda. Berbagai fenomena tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suseno (2010) mengenai nasionalisme Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa:

Terdapat dua macam yang mencuat dari situasi tidak memuaskan di negara kita bahwa pemuda Indonesia larut dalam bahaya hedonis konsumerisme dengan menyerah menarik diri dari kehidupan bangsa, alias golput, dan yang kedua bahwa mereka mengisi kekosongan cita-cita bangsa dengan *ajaran-jaaran radikal ekstrimis*. <sup>2</sup>

Dari paparan di atas, dapt dipahami bahwa pemuda indonesia kini berada dalam kondisi sulit sehingga perlu adanya perhatian dan usaha terencana untuk membangun semangat generasi muda Indonesia, yang terprogram dan terkonsep secara matang. Salah satu bentuk Pendidikan yang dapat dipilih adalah Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela negara kini tengah menjadi sebuah isu krusial. Budimansyah mengemukakan beberapa alasan baerkaitan dengan pentingnya bela negara:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk. Membangun Karakter Bangsa . Bandung: Widya Aksara Press.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suseso. (2010). Pendidikan Etika, Malang: UIN Maliki Press.

- 1. Berdasarkan pertimbangan kemanfaatannya, yakni bahwa aspek pertahanan dan keamanan negara merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara.
- 2. Berdasarkan tuntutan Konstitusi Negara, yakni adanya keawajiban warga negara dalam upaya membela negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
- 3. Berdasarkan tuntutan Undang-Undang yakni UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa bela negara sangat bermanfaat untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Hak dan kewajiban bela negara seperti halnya yang disebutkan dalam definisi bela negara tersebut dengan tegas dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (3) perubahan kedua yang berbunyi "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ketentuan mengenai upaya bela negara tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada Pasal 9 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Urgensi dari dua pasal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa setiap warga negara baik pemerintah maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara jelas ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 bahwa:

Ayat (1) setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2) keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui: (a) pendidikan kewarganegaraan, (b) pelatihan dasar kemiliteran wajib, (c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan (d) pengabdian sesuai profesi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai hal, namun untuk mencapai hasil optimal perlu ada usaha terencana dan terkonsep secara matang, terutama dalam pendidikan bela negara bagi generasi muda.

Persoalan bela negara masih menyisakan pekerjaan bagi terciptanya kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut

Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk. Membangun Karakter Bangsa . Bandung: Widya Aksara Press.

seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika didiseminasikan melalui pendidikan formal. Pendidikan Bela Negara ini bukanlah pendidikan militer atau wajib militer, tetapi pendidikan yang disesuaikan dengan iklim dan nuansa pendidikan<sup>4</sup>.

Salah satu bentuk pendidikan pendahuluan bela negara di Indonesia yang dilaksanakan melalui Pendidikan kewarganegaraan untuk warga sipil memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. <sup>5</sup> Namun pada praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan menemui kendala dalam menemukan formulasi tepat untuk menciptakan warga negara yang mempunyai cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun non-fisik.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hendak mengungkap persepsi mahasiswa Universitas Siliwangi mengenai desain Pendidikan Bela Negara (PBN) yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kekayaan keilmuan yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, khususnya mengenai kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk merancang program Pendidikan Bela Negara agar implementasinya tepat guna dan dapat di internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif dengan pola "the dominant-less dominat design". Bagian pertama dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni melalui metode survey. Pendekatan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8(3). https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suharyanto, A. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 1, 1(2), 192–203.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gredinand, D. (2017). Application of state defense education in colleges. Strategi Pertahanan Darat, 3(2), 1–27.

kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan yang dominan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian untuk mengukur banyak variabel dan membuat simpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena. Penelitian ini pun mengambil sampel dari suatu populasi mahasiswa dari jurusan yang berbeda yang berada pada 15 (lima belas) program studi di Universitas Siliwangi. Sementara, untuk pendekatan kualitatif, dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 15 (lima belas) mahasiswa peserta Pendidikan Bela Negara, Setelah itu dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. <sup>7</sup> Secara umum, persepsi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pengelompokan dan penginterprestasian berdasarkan pengalaman tentang peristiwa yang diperoleh melalui panca inderanya untuk menyimpulkan informasi. Persepsi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab persepsi akan melahirkan sikap atau kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Persepsi dalam konteks penelitian ini adalah pendapat sikap dan pemahaman peserta PBN UNSIL 2020 dalam kaitannya dengan desain Pendidikan Bela Negara yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai desain Pendidikan Bela Negara, peneliti membagikan kuisioner kepada 200 mahasiswa peserta PBN UNSIL 2020. Kuisioner yang dibagikan berupa pertanyaan terbuka, yang kemudian jawaban dari setiap peserta dikelompokkan kedalam beberapa kelompok pernyataan yang memiliki persepsi yang hampir sama. Berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa peserta PBN UNSIL 2020 dapat diperoleh data sebagai berikut:

### 1. Persepsi Mahasiswa tentang Pendidikan Bela Negara

Pendidikan Bela Negara merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengarahan, dan penggunaan serta pengendalian untuk mengubah sikap dan perilaku warga negara yang tanggap terhadap permasalahan bangsa dan negara yang dilandasi pada nilai-nilai kecintaan kepada tanah air, kesadaran bela negara, yakni Pancasila sebagai Ideologi Negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara sehingga mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id

kekuatan pertahanan bangsa dan negara. <sup>8</sup> Bela negara merupakan langkah yang ditempuh untuk menciptakan ketahanan nasional negara agar terhindar dari segala bentuk yang akan mengganggu kedaulatan suatu negara. Secara singkat, "Bela negara adalah upaya setiap warga negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. <sup>9</sup>

Bela negara tidak hanya memiliki pengertian statis yang dipahami sebagai tindakan "memanggul senjata" atau hal ikhwal yang berbau "militerisme" dan bukan semata-mata hanya tugas TNI, tetapi merupakan tugas segenap warga Negara sesuai kemampuan dan profesi dalam masyarakat. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, supaya mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok kepentingan.

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada peserta PBN UNSIL 2020, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1.1. Persepsi Mahasiswa Peserta PBN UNSIL mengenai Pendidikan Bela Negara

No	Fokus Penelitian	%	Jawaban
5.	Apa yang anda pahami tentang bela negara?		Upaya membela, mempertahankan, mencintai dan menjaga terhadap negara Indonesia. Membela negara yang tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan.
		33%	Suatu kegiatan untuk menanamkan karakter nasionalisme dan kedisiplinan yang kuat. Suatu sikap kecintaan, rasa nasionalisme akan keinginan untuk menjaga dan membela negara.
		32%	Kewajiban setiap masyarakat untuk mempertahankan negara

Berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada peserta PBN UNSIL, secara garis besar, diperoleh tiga persepsi mahasiswa berkenaan dengan hakikat bela negara. Sebanyak 34% mempersepsikan bahwa bela negara adalah upaya membela, mempertahankan, mencintai dan menjaga terhadap negara Indonesia, membela negara yang tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Sebanyak 33% mempersepsikan bela negara merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan karakter nasionalisme dan kedisiplinan yang kuat, sikap kecintaan, dan rasa keinginan untuk menjaga dan membela negara. Dan yang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dahliyana, Asep dkk. (2020). Pendidikan pendahuluan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 2 Tahun 2020 130 – 141 DOI. 10.21831/jc.v17i2.27919

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Winarno, 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

lainnya (32%) mempersepsikan bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap masyarakat untuk mempertahankan negara.

Sebagian besar narasumber (34%) mempersepsikan bahwa bela negara adalah upaya membela, mempertahankan, mencintai dan menjaga terhadap negara Indonesia, membela negara yang tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Hal ini sejalan dengan pendapat winarno yang menyebutkan bahwa "Bela negara adalah upaya setiap warga negara Republik Indonesia terhadap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. 10

Sebanyak 33% mempersepsikan bela negara merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan karakter nasionalisme dan kedisiplinan yang kuat, sikap kecintaan, dan rasa keinginan untuk menjaga dan membela negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo yang mendefinisikan bela negara sebagai sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilavah, vuridiksi nasional dan nilai - nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.11

Sebanyak 32% narasumber mempersepsikan bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap masyarakat untuk mempertahankan negara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2002 pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: "warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara"

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi mahasiswa berkaitan dengan konsep Bela Negara secara teoritis sudah sangat baik. Namun, seperti yang dikemukakan Sutarman dalam hasil penelitiannya "Sampai kapanpun persepsi, makna dan pengertian pembelaan negara (bela negara) dan ketahanan nasional tidak boleh hanya sampai pada tataran konsep/ teori ataupun pengetahuan saja, tetapi harus benar-benar terinternalisasi dan terimplementasi dalam sikap dan perbuatan sehari-hari". <sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa, selain memberikan pengetahuan teoritis berkaitan dengan konsep bela negara, diperlukan pula upaya-upaya terutama dalam bidang pendidikan, yang bertujuan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Winarno (2013) Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal. CIVICS, I(1), 18-31

<sup>12</sup> Sutarman. Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 Amandemen, Magistra No. 75 Th. XXIII, (2011), 77.

menanamkan nilai-nilai bela negara dalam diri mahasiswa sehingga konsep bela negara tidak hanya dipahami dalam sebatas pengertiannya.

# 2. Persepsi Mahasiswa tentang Bentuk Pendidikan Bela Negara untuk di Pendidikan Tinggi

Beberapa negara maju mengaktualisasikan bela negara dengan wajib militer, diantaranya Korea Selatan dan Norwegia. Pada pendidikan bela negara melalui wajib militer tersebut, warga negara yang ikut berpartisipasi telah memainkan peran dalam pembangun kewarganegaraan, kebangsaan, bahkan sampai pada kejantanan.<sup>13</sup> Temuan tersebut diperkuat oleh Hwang di mana secara historis, wajib militer yang diselenggarakan oleh Korea Selatan telah memproduksi warga negara yang mampu berperan aktif dalam memperbaiki batas-batas diskursif bangsa bahkan memiliki pemahaman militer tentang kewarganegaraan dan keamanan nasional<sup>14</sup>.

Selain Korea Selatan, Norwegia juga melaksanakan Pendidikan Bela Negara dengan bentuk Wajib Militer. Kosnik menyebutkan bahwa wajib militer di Norwegia merupakan strategi pertahanan pertama yang berperan untuk melaksanakan misi-misi seperti pertahanan teritorial dan keamanan perbatasan. Lebih lanjut Kosnik memprediksi, bahwa wajib militer akan tetap menjadi alat strategi bagi negara-negara kecil pada abad 21, mengingat wajib militer dapat menyelesaikan berbagai tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan keamanan nasional negara.<sup>15</sup>

Di ASEAN, Singapura merupakan negara yang menerapkan bela negara dalam bentuk wajib militer. Hasil dari wajib militer di Singapura memperlihatkan prajurit nasional dengan kualitas disiplin, tanggung jawab, semangat tim, dan kebugaran fisik yang mumpuni. Keadaan tersebut dimanfaatkan secara positif oleh peserta wajib militer dalam kehidupan sipil yang selanjutnya menjadi ciri khas dari tenaga kerja Singapura <sup>16</sup>. Hal tersebut menurut Randall membuktikan bahwa keterlibatan sipil sangat berarti dalam membangun negara <sup>17</sup>. Hasil dari

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kwon, I. (2000). A feminist exploration of military conscription: The gendering of the connections between nationalism, militarism and citizenship in South Korea. International Feminist Journal of Politics, 3(1), 26–54. https://doi.org/10.1080/713767489

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hwang, I. (2018). Militarising national security through criminalisation of conscientious objectors to conscription in South Korea. Critical Studies on Security, 6(3), 296–311. https://doi.org/10.1080/21624887.2018.1424986

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kosnik, M. (2017). Conscription in the twenty-first century: Do reinforcements equal security? Comparative Strategy, 36(5), 457–467. https://doi.org/10.1080/01495933.2017.1379 839

 $<sup>^{16}\,</sup>$  Nair, E. (1995). Nation-building in Singapore : Psychological analysis. Journal of Human Values, 1(1), 93–102

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Randall, D. (2017). Making citizens: How American universities teach civics. National Association of Scholars.

beberapa penelitian di atas memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan bela negara diaktualisasikan langsung dengan membuat keterikatan antara warga negara dengan negara dengan menjadi bagian yang secara emosional menjadikan terikat karena adanya visi-misi yang tegas dalam upaya pendidikan pendahuluan bela negara.<sup>18</sup>

Keadaan yang berbeda diungkapkan dalam kajian Mellors & McKean bahwa wajib militer pada perkembangannya dipertanyakan dalam hal pendanaan dan strateginya di Eropa Utara. 19 Hal tersebut disebabkan, terjadinya peningkatan atas pengakuan keberatan yang berasal dari hati nurani warga negara yang dipicu oleh liberalisasi layanan wajib militer.

Tabel 1.2. Persepsi Mahasiswa Peserta PBN UNSIL Mengenai Desain Pendidikan Bela Negara yang Sesuai dengan Kebutuhan Generasi Muda

No	Fokus Penelitian	%	Jawaban
8.	Bagaimana bentuk pendidikan bela negara	38%	<b>(b)</b> lebih menyenangkan, lebih dekat dengan alam, terkesan serius tapi santai
	yang cocok untuk anda? (bulatkan salah satu)  a. Berbentuk penyampaian materi  b. Berbentuk super	36%	(c) Lebih merasa bagian dari sistem ketahanan nasional, menjadi bagian dari militer yang siap membela negara. Selain itu, dapat mencontoh sikap sikap tegas dan disiplin dari militer.
		20%	(a) memberikan materi menarik, tidak membosankan sehingga lebih santai
		6%	<ul> <li>(d) Lainnya:</li> <li>pengenalan wilayah Indonesia, batas negara, bentuk ancaman yang harus ditaklukan.</li> <li>Camping &amp; Survival</li> </ul>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dahliyana, Asep dkk. (2020). Pendidikan pendahuluan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, Jurnal Civics; Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 2 Tahun 2020 130 - 141 DOI. 10.21831/jc.v17i2.27919

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mellors, C., & McKean, J. (1984). The politics of conscription in Western Europe. West European Politics, 7(3), 25-42. https://doi.org/10.1080/01402388408424485

9.	Bagaimanakah harapan anda terhadap Program Pendidikan Bela Negara pada Pendidikan Tinggi?	I	berharap PBN dapat menjadikan mahasiswa menjadi lebih tangkas dan kreatif dalam memimpin, dan merencanakan setiap aspek yang ada. Mahasiswa tidak hanya sukses secara materi, juga dalam perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menjaga, dan mengharumkan negara Indonesia.
		23 %	mengharapkan adanya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, mensimulasikan isu terkini atau simulasi perang atau simulasi penenganan konflik.
		12%	berharap PBN bisa menjadi pusat pendidikan bela negara untuk mahasiswa, menjadi pelopor untuk Universitas yang lain.
		10%	berharap mendapatkan pelatihan dengan fasilitas yang memadai.

Persepsi tentang desain bela negara yang dibutuhkan, sebagian besar mahasiswa (38%) memilih Super Camp sebagai bentuk kegiatan yang di butuhkan, dengan alasan lebih menyenangkan, lebih dekat dengan alam, terkesan serius tapi santai. Sebagian besar lainnya (36%) memilih Wajib Militer sebagai bentuk pendidikan bela negara yang dibutuhkan, dengan alasan lebih merasa bagian dari sistem ketahanan nasional, menjadi bagian dari militer yang siap membela negara. Selain itu, dapat mencontoh sikap sikap tegas dan disiplin dari militer. Setelah di konfirmasi dengan wawancara, bentuk wajib militer yang dimaksud tidaklah sama dengan wajib militer di korea selatan, yang dimaksud wajib militer di sini adalah, setting kegiatan yang mirip dengan pelatihan militer dan di latih oleh militer. Beberapa mahasiswa (20%) memilih jawaban (a), yaitu berbentuk penyampaian materi, dengan memberikan catatan yaitu memberikan materi menarik, tidak membosankan sehingga lebih santai. Mahasiswa lainnya (6%) memeberikan option (d) yaitu lainnya, dengan mencantumkan: 1) pengenalan wilayah Indonesia, batas negara, bentuk ancaman yang harus ditaklukan, dll. 2) Camping & Survival, 3) pendidikan karakter, 4) materi & prakteknya, 5) membentuk mental.

Berkenaan dengan harapan mahasiswa terhadap PBN, berdasarkan kuisioner yang dibagikan, dapat diketahui bahwa 55% berharap PBN dapat menjadikan mahasiswa menjadi lebih tangkas dan kreatif dalam memimpin, dan merencanakan setiap aspek yang ada. Mahasiswa tidak hanya sukses secara materi, juga dalam perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menjaga, dan mengharumkan negara Indonesia. Sebnayak 23% mahasiswa mengharapkan adanya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, mensimulasikan isu terkini atau simulasi perang atau simulasi penenganan konflik. 12% mahasiswa berharap PBN bisa menjadi pusat pendidikan bela negara untuk mahasiswa, menjadi pelopor untuk

Universitas yang lain. Dan sisanya, 10% berharap mendapatkan pelatihan dengan fasilitas yang memadai.

Persepsi mahasiswa mengenai desain pendidikan bela negara yang sesuai dengan kebutuhan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, dengan tujuan supaya Pendidikan Bela Negara yang didesain sesuai dengan yang di butuhkan. Berdasarkan hasil survey, sebagian besar mahasiswa (38%) memilih Super Camp sebagai bentuk kegiatan yang di butuhkan, dengan alasan lebih menyenangkan, lebih dekat dengan alam, terkesan serius tapi santai. Sebagian besar lainnya (36%) memilih Wajib Militer sebagai bentuk pendidikan bela negara yang dibutuhkan, dengan alasan lebih merasa bagian dari sistem ketahanan nasional, menjadi bagian dari militer yang siap membela negara. Selain itu, dapat mencontoh sikap sikap tegas dan disiplin dari militer. Setelah di konfirmasi dengan wawancara, bentuk wajib militer yang dimaksud tidaklah sama dengan wajib militer di korea selatan, yang dimaksud wajib militer di sini adalah, setting kegiatan yang mirip dengan pelatihan militer dan di latih oleh militer.

Beberapa mahasiswa (20%) memilih jawaban (a), yaitu berbentuk penyampaian materi, dengan memberikan catatan yaitu memberikan materi menarik, tidak membosankan sehingga lebih santai. Mahasiswa lainnya (6%) memeberikan option (d) yaitu lainnya, dengan mencantumkan: 1) pengenalan wilayah Indonesia, batas negara, bentuk ancaman yang harus ditaklukan, dll. 2) Camping & Survival, 3) pendidikan karakter, 4) materi & prakteknya, 5) membentuk mental.

Berkaitan dengan harapan mahasiswa terhadap PBN UNSIL,55% berharap PBN di UNSIL dapat menjadikan mahasiswa menjadi lebih tangkas dan kreatif dalam memimpin, dan merencanakan setiap aspek yang ada. Mahasiswa tidak hanya sukses secara materi, juga dalam perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menjaga, dan mengharumkan negara Indonesia. Sebnayak 23 % mahasiswa mengharapkan adanya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, mensimulasikan isu terkini atau simulasi perang atau simulasi penenganan konflik. 12% mahasiswa berharap PBN bisa menjadi pusat pendidikan bela negara untuk mahasiswa, menjadi pelopor untuk Universitas yang lain. Dan sisanya, 10% berharap mendapatkan pelatihan dengan fasilitas yang memadai.

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (15) disebutkan bahwa "mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi". Apabila dilihat dari segi umur 18-25 tahun, jadi mereka dapat digolongkan sebagai remaja akhir sampai orang dewasa"20 . Pada usia ini metode pendidikan akan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Sadulloh, Uyoh. (2004). Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta

lebih disukai apabila menggunakan metode kreatif, inovatif dan dikombinasikan antara teori dengan praktik.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa sebagai mahasiswa, selain sebagai warga negara dewasa, juga merupakan masyarakat intelektual yang berperan sebagai agen perubahan baik dari segi keilmuan, moralitas serta pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berlangsung secara dinamis mengikuti arah perubahan yang pasti. Bila di kaitkan dengan Pendidikan Bela Negara, maka pendidikan bela negara yang dibutuhkan adalah pendidikan yang mencakup semua aspek tersebut, namun didesain sedemikian rupa sehingga kegiatan tersebut tetap terkesan serius tapi santai.

Lebih lengkap, Widodo mendefinisikan bela negara sebagai sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara untuk melakuan aktifitas bela negara.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, kekuatan militer dalam sebuah negara memang merupakan kekuatan yang sangat penting dan menentukan dalam membentuk kekuatan negara, namun jika tidak didukung oleh berbagai faktor lain seperti kesadaran dari setiap warga negara, termasuk masyarakat sipil, maka usaha untuk mencapai ketahanan negara tidak akan tercapai dengan baik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Glassner tentang faktor dan komponen kekuatan negara, ia menjelaskan bahwa:

Faktor pertama adalah faktor militer, yang terdiri dari angkatan darat, laut dan udara. Kekuatan Militer dikendalikan oleh kualitas personal juga faktor persenjataan, bahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain. Setelah militer, faktor yang sangat menentukan lainnya adalah integrasi nasional yang terdiri dari spiritual dan moral integrasi serta integrasi ekonomi (struktur dan ruang).<sup>22</sup>

Untuk menjadi negara besar dan kuat, yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang kokoh, maka negara harus mampu membengun pondasi yang kuat, baik dari segi kekuatan militer, maupun faktor-faktor pendukung lain seperti faktor integrasi nasional yang akan terwujud dengan adanya kesadaran setiap warga negara untuk senantiasa berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Karena, usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. Jurnal. CIVICS, I(1), 18-31

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Havati, S., Yani, A. 2007. Geografi Politik, Bandung: Refika Aditama,

warga Negara akan hak dan kewajibannya yang ditumbuh kembangkan untuk mencintai tanah air. Hal ini akan berhasil bila setiap warga Negara memahami keunggulan, kelebihan dan kekurangan bangsanya. Oleh sebab itu, kesadaran warga negara sangat diperlukan guna mendukung dan berpartisipasi dalam upaya bela negara.

Semangat bela negara dapat ditanamkan dalam beberapa nilai, Suseno, A mengemukakan beberapa nilai tersebut yaitu" (1) nilai-nilai kejuangan 1945, (2) nilai-nilai berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, (3) pewaspadaan terhadap nilai-nilai (asing) yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan (4) nilai-nilai patriotisme". Selain penanaman nilai-nilai tersebut, Pendidikan Bela Negara juga perlu menanamkan kesadaran tentang peran masing-masing (mahasiswa) dalam upaya bela negara. Seperti yang dikemukakan Winarno keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

- 1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak;
- 2) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat;
- 3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika);
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/ undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 5) Pembekalan mental spiritual di aklanagan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Allah SWT, melaui ibadah sesuai agama/ kepercayaan masing-masing.<sup>23</sup>

Tolak ukur/parameter keberhasilan penerapan Pendidikan Bela Negara di Perguruan Tinggi melalui kurikulum diantaranya harus mempunyai 5 (Lima) nilai dasar, yaitu Cinta Tanah Air, Rela Berkorban, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Pancasila sebagai Ideologi Negara, dan Kemampuan Awal Bela Negara, baik secara fisik maupun non fisik.<sup>24</sup> Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ada begitu banyak nilai dan konsep yang perlu diajarkan tentang bela negara dan kesadaran bela negara kepada segenap masyarakat, terutama mahasiswa. Untuk menanamkan nilai-nilai semangat tersebut tidaklah mudah, diperlukan cara

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Winarno (2013) Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Gredinan, Doni. (2017). *Penerapan pendidikan bela negara di perguruan tinggi.* Jurnal Prodi.Idu.Ac.Id (2017)

#### 128 Yunita, Persepsi Mahasiswa Universitas Siliwangi

atau metode yang tepat, supaya pendidikan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah memahami konsep-konsep bela negara. Desain Pendidikan bela negara yang di butuhkan adalah berbentuk Super Camp. Bentuk lain yang dipilih adalah "Wajib Militer" namun yang dimaksud di sini bukanlah wajib militer seperti di negara korea selatan, akan tetapi, wajib militer yang dimaksud adalah pelatihan yang didampingi oleh militer dan mendapatkan pelatihan dengan materi militer. Beberapa mahasiswa memilih penyampaian materi, dan yang lainnya memberikan pilihan: pengenalan wilayah Indonesia, batas negara, dan bentuk bentuk ATHG Keamanan Nasional, Camping & Survival serta pendidikan karakter.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk. Membangun Karakter Bangsa . Bandung: Widya Aksara Press.
- Dahliyana, Asep dkk. (2020). Pendidikan pendahuluan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 2 Tahun 2020 130 – 141 DOI. 10.21831/jc.v17i2.27919
- Gredinan, Doni. (2017). Penerapan Pendidikan Bela Negara Di Perguruan Tinggi. Jurnal Prodi.Idu.Ac.Id (2017)
- Hayati, S., Yani, A. 2007. Geografi Politik, Bandung: Refika Aditama,
- Hwang, I. (2018). Militarising national security through criminalisation of conscientious objectors to conscription in South Korea. Critical Studies on Security, 6(3), 296–311. https://doi.org/10.1080/21624887.2018.142498 6
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2018). PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 8(3). https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.437
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id
- Kosnik, M. (2017). Conscription in the twenty-first century: Do reinforcements equal security? Comparative Strategy, 36(5), 457-467. https://doi.org/10.1 080/01495933.2017.1379839
- Kwon, I. (2000). A feminist exploration of military conscription: The gendering of the connections between nationalism, militarism and citizenship in South Korea. International Feminist Journal of Politics, 3(1), 26-54. https://doi. org/10.1080/713767489
  - Mellors, C., & McKean, J. (1984). The politics of conscription in Western Europe. West European Politics, 7(3), 25-42. https://doi. org/10.1080/01402388408424485
- Nair, E. (1995). Nation-building in Singapore: Psychological analysis. Journal of Human Values, 1(1), 93–102
- Randall, D. (2017). Making citizens: How American universities teach civics. National Association of Scholars.

Sadulloh, Uyoh. (2004). Pedagogik (Ilmu Mendidik). Bandung: Alfabeta

Suharyanto, A. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar siswa. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 1, 1(2), 192–203.

Suseso. (2010). Pendidikan Etika, Malang: UIN Maliki Press.

Sutarman. (2011) Persepsi dan Pengertian Pembelaan Negara Berdasarkan UUD 1945 Amandemen, Magistra No. 75 Th. XXIII, (2011), 77.

Widodo, S. (2011). *Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme*. Jurnal. CIVICS, I(1), 18–31

Winarno, 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi. Jakarta: PT Bumi Aksara.